



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANANG DIRJO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 63011

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/154 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 876.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT CKD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV HRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.062.500.000

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.012.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampalan/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAN S
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 995250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	27.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	17.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	185.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	212.200.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	212.200.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZUAIMY AMRAN
2. Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
3. NHK : 453487

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	258.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
8.000.000		
2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER MINIBUS Tahun 2022, HASIL		
SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	185.059.287
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	443.059.287
III. HUTANG	Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	323.059.287

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZUAIMY AMRAN
NIK : 6271011612810002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT
Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 7 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-07 12:14:38



Dipindai dengan CamScanner



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUMI YANTI GINTING
2. Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
3. NHK : 136616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	262.000.000
1. MOBIL, EXVANDER ULTIMATE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 262.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	277.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	277.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ATI BILEM
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 1000228

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.451 m2/725 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	431.666
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	900.431.666
III. HUTANG	Rp.	301.336.080
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	599.095.586

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ORINA TUTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3. NHK : 1000067

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU AYL A 1.0 M AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI		
Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 9.000.000		
3. MOTOR, HONDA UD 110 NE Tahun 2013, HASIL SENDIRI		
Rp. 8.000.000		
4. MOTOR, HONDA NF11T11CO1 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI		
Rp. 8.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	135.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	135.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



- Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIAWAN SUJATMIKO
2. Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
3. NIK : 872940

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	510.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 817 m ² /84 m ² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	119.500.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	645.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	645.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



- Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISWATY
2. Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
3. NHK : 991762

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	140.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 41 m2/277 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.500.000
1. MOTOR, YAMAHA 31B (JUPITER Z CW) 115CC / SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA B401 RA-GMZFI (CALYA 1,2 G M/T) /MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	72.246.117
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	327.746.117
III. HUTANG	Rp.	49.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	278.746.117

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



- Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASPANI
2. Jabatan : PENGELOLA REALISASI LAPORAN RETRIBUSI DAERAH
3. NHK : 1000601

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	456.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 599 m2/126 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
3. Tanah Seluas 5.108.080 m2 di KAB / KOTA GAMBUT BANJAR, Rp. 51.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	221.800.000
1. MOBIL, DAIHATSU F651RV-GMRFJ(4X2) M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF125/TR M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 16.700.000		
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
4. MOTOR, HONDA F1C02N48L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.100.000		
5. MOTOR, HONDA H1B02N41L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	128.066.175



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	805.866.175
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	805.866.175

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ASPANI
NIK : 6203011006730002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Kerja : BIDANG RETRIBUSI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER
DAN PENDAPATAN LAINNYA
Jabatan : PENGELOLA REALISASI LAPORAN RETRIBUSI DAERAH
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 31 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpnp@kpk.go.id | <https://elhkpnp.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

- I. DATA PRIBADI**
1. Nama : JOAN DONA PRATAMA
 2. Jabatan : ANALIS PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
 3. NIK : 1035909

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	200.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	334.000.000
1.	MOBIL, CHERY TIGGO CROSS CSH Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	71.006.992
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	629.006.992
III. HUTANG		Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	629.006.992

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : JOAN DONA PRATAMA
NIK : 6271031506970003
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT
Jabatan : ANALIS PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN
Tanggal Kirim : 6 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-21 15:40:31



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KING ON PUTRA JAYA
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 1000434

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	287.856.000
1. Tanah Seluas 6 m2 di KAB / KOTA BARITO TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 287.856.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	160.000.000
1. MOTOR, HONDA V1J02Q32L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	455.066.000
III. HUTANG	Rp.	723.131.624
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-268.065.624

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KING ON PUTRA JAYA
NIK : 6204062805750001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Kerja : PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH BUNTOK
Jabatan : KEPALA UPT
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 4 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-06-29 10:37:56



Dipindai dengan CamScanner



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI ANRIANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
3. NHK : 1001067

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	115.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 461 m2/110 m2 di KAB / KOTA BARITO SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	444.500.000
1. MOBIL, HONDA BR-V DG3 1.5 L E M/T / MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BTE A/T / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA BJM A/T / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	197.789.613
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	757.289.613
III. HUTANG	Rp.	167.083.905
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	590.205.708

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : TRI ANRIANI
NIK : 6204066511820002
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Kerja : UPTPPD BAPENDA SE - KALTENG
Jabatan : KEPALA SEKSI PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 4 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-03-22 20:51:42



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITI WUNTARSIH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 934333

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	50.200.000
III. HUTANG	Rp.	286.006.129
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-235.806.129

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : TITI WUNTARSIH
NIK : 6203014805850010
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Kerja : PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH BUNTOK
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 4 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.